

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan perusahaan (Rudiyanto, 2012). Secara keseluruhan tujuan akuntansi yaitu memberikan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Hery (2018) menjelaskan bahwa akuntansi dilihat berdasarkan beberapa sudut pandang. Akuntansi sebagai suatu ideologi yang mampu melegitimasi suatu keadaan struktur ekonomi, sosial, dan politik. Akuntansi juga dipandang sebagai bahasa bisnis karena sebuah media komunikasi untuk memberikan informasi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi sebagai catatan historis, yaitu pencatatan transaksi yang didasarkan pada masa yang telah lewat. Catatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi bagaimana manajemen mengelola sumber daya yang ada diperusahaan. Akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini yaitu diharapkan perusahaan menggunakan nilai pasar wajar bukan menggunakan biaya historis dalam mencatat dan melaporkan harta dan kewajiban perusahaan. Pandangan lain tentang akuntansi yaitu sebagai sistem informasi, yaitu akuntansi dapat mengilustrasikan hubungan antara sumber data mengenai keuangan dengan para penerima informasi melalui siklus akuntansi. Selanjutnya akuntansi juga dipandang sebagai komoditas, pertanggungjawaban, dan teknologi. Pada umumnya akuntansi terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Posisi Keuangan,

Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang termasuk kedalam Laporan Keuangan perusahaan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan hasil dari proses akuntansi sehingga dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai data keuangan atau aktivitas perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan, sumber kekayaan yang berasal dari kegiatan dalam mencari laba, menaksir peluang perusahaan dalam memperoleh laba, memberikan informasi penting mengenai perubahan aktiva dan kewajiban, serta menyatakan informasi penting yang relevan untuk pengguna laporan keuangan (Rudianto, 2012).

Para pengguna akuntansi dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal terdiri dari Direktur dan Manajer Keuangan, Direktur Operasional dan Manajer Pemasaran, Manajer dan Supervisor Produksi, sedangkan pengguna eksternal adalah investor, kreditor, pemerintah, BAPEPAM-LK dan ekonom, praktisi maupun analis.

Akuntansi sendiri disusun dan diterapkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di setiap Negara. Standar akuntansi tersebut dapat mencakup peraturan dan prosedur yang disahkan atau diresmikan oleh badan pembentuk standar akuntansi. Dalam standar akuntansi keuangan dijelaskan apa saja transaksi yang harus dicatat, bagaimana mekanisme pencatatannya, serta bagaimana pengungkapannya yang kemudian disajikan dalam laporan keuangan (Hery, 2018).

Standar akuntansi keuangan pada umumnya terdiri dari 5 pilar Standar Akuntansi Keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang diadaptasi dari IFRS (*International Financial Reporting Standards*) dimana standar ini diperuntukan bagi organisasi yang memiliki akuntabilitas publik dengan kriteria bahwa entitas tersebut telah mendaftar atau sedang dalam proses pengajuan kepada otoritas pasar modal dengan tujuan untuk menerbitkan sekuritas di pasar modal dan juga beberapa persyaratan lainnya. Selanjutnya terdapat Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik yang diperuntukan bagi organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik dengan kriteria menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum yang diperuntukan kepada pihak eksternal (Rudianto, 2012).

Standar Akuntansi pemerintah yang menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 adalah lah “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Selanjutnya ada Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang merupakan standar akuntansi yang diperuntukan bagi entitas yang melakukan transaksi syariah baik yang termasuk sebagai lembaga syariah maupun non syariah. Standar Akuntansi Keuangan Syariah masih berdasarkan SAK umum tetapi berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Standar Akuntansi Keuangan EMKM yang dirancang oleh Dewan Standar Akuntansi tahun 2015 yang diperuntukan bagi pelaku UMKM.

Pada saat ini banyak masyarakat yang menjalankan usaha berskala kecil mulai dari usaha makanan, pakaian, dan jenis usaha lainnya yang menjadi kebutuhan

masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

UMKM memiliki tujuan untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan usaha agar membangun perekonomian nasional yang didasari oleh demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di atas menurut Pedoman Umum Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum Tahun 2015 yang merupakan kerja sama antara Bank Indonesia dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa Usaha Mikro terbagi atas usaha orang perorangan dan badan usaha perorangan yang bukan badan hukum, sedangkan usaha kecil terdiri atas usaha orang perorangan dan badan usaha yang

merupakan badan hukum dan bukan badan hukum. Dalam pedoman tersebut juga menjelaskan entitas pelaporan adalah sebuah wilayah terbatas dari kegiatan ekonomi yang informasi keuangannya memiliki potensi untuk berguna bagi investor ekuitas yang ada dan yang potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lain yang tidak dapat memperoleh informasi secara langsung yang mereka butuhkan dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya untuk entitas dan dalam menilai apakah manajemen dan dewan pengatur itu entitas telah membuat penggunaan sumber daya yang disediakan secara efisien dan efektif sedangkan Usaha mikro dan kecil yang berbentuk usaha perorangan dan badan usaha perorangan tidak memenuhi kriteria entitas pelaporan berdasarkan definisi entitas pelaporan dalam *ED Conceptual Framework for Financial Reporting*.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini merupakan usaha yang sedang banyak dijalankan oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Secara tidak langsung usaha ini banyak membuka peluang pekerjaan dengan berbagai inovasi dan kreatifitas masyarakat sehingga mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Maka dari itu UMKM tersebut harus mengambil keputusan yang bagus, dan bisa melihat bagaimana *going concert* atau bisa mempertahankan atau mengelola dengan baik usaha yang sedang dijalankan dalam bentuk pertanggungjawaban berupa pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Para UMKM diharuskan menyajikan laporan keuangannya untuk melihat keberlangsungan UMKM tersebut. Namun penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diberlakukan saat itu

dianggap terlalu sulit untuk diterapkan. Sejak 1 Januari 2018 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK-EMKM) yang diperuntukan bagi Entitas yang tidak memiliki akuntan seperti UMKM karena dipandang terlalu sulit dan kompleks untuk menggunakan SAK-IFRS maupun SAK-ETAP. Dengan adanya standar ini maka UMKM akan dengan mudah menyusun laporan keuangan karena sistematika penyusunan yang cenderung sederhana. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk membuat pedoman umum pencatatan transaksi keuangan untuk Usaha Kecil, Badan Usaha bukan Badan Hukum sejak tahun 2015.

Tidak hanya itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juga mengatur mengenai pengembangan dan pembinaan UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran UMKM dalam perekonomian nasional. Hal ini juga berkaitan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Supaya kebijakan berjalan maka diperlukan Pilar Edukasi Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan termasuk UMKM.

Penelitian Widiastiawati & Hambali (2020) yang meneliti di UD Sari Bunga menemukan bahwa alasan mengenai tidak diterapkannya SAK-EMKM dikarenakan pemahaman UMKM yang masih sangat rendah. Ismadewi *et al.*, (2017) juga menemukan adanya keterbatasan yang perusahaan dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan SAK-EMKM.

Tidak hanya di Indonesia, tantangan dan hambatan dalam penerapan Standar Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah juga terjadi di Nigeria. Dalam penelitian (EZEAGBA, 2017) menemukan “tantangan yang dihadapi UKM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah: pembukuan dan pencatatan yang kurang memadai, tenaga kerja, sistem akuntansi dan tidak berjalannya transaksinya melalui sistem perbankan. Studi ini merekomendasikan antara lain bahwa karena menyimpan pembukuan yang benar dan persiapan catatan keuangan hanya dapat dilakukan oleh akuntan profesional, dua badan utama di Nigeria: ICAN dan ANAN harus mendorong anggotanya untuk menawarkan layanan profesional gratis kepada UKM di Nigeria.

Penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari UMKM itu sendiri melainkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat. Penelitian Janrosi (2018) menyatakan bahwa sosialisasi mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK-EMKM.

Banyak kesalahan yang umumnya terjadi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah seperti kesalahan pencatatan ketika terjadi transaksi. Kurangnya pemahaman mengenai periode akuntansi, misalnya ketika pencatatan yang seharusnya dicatat pada bulan ini tetapi justru dicatat pada bulan berikutnya. Penggunaan metode-metode berupa penilaian aktiva lainnya yang masih bersifat spekulatif seperti pada metode penilaian persediaan, metode penilaian aktiva tetap

lainnya. Sehingga menyebabkan proses transaksi yang terhambat dan tidak akurat menyebabkan lambatnya penyajian laporan keuangan. Tidak adanya laporan keuangan yang terstandarisasi atau masih menyusun laporan keuangan yang sederhana sehingga tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

CV XYZ di Kota Gorontalo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan. Sama halnya dengan pelaku UMKM lainnya CV XYZ mengalami kesulitan terhadap penyusunan laporan keuangan karena kurangnya pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan yang baik, sehingga penyusunan laporan keuangan CV XYZ hanya mengandalkan pengetahuan sederhana yang dimiliki.

Pencatatan akuntansi CV XYZ dalam kesehariannya yaitu mencatat transaksi menggunakan excel yang kemudian akan dibuatkan laporan keuangan tahunan. Namun CV XYZ masih merasa kesulitan ketika menyusun laporan keuangan dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai standar akuntansi keuangan sehingga sangat berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan CV XYZ.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu langkah strategis yang dapat memberikan informasi yang akurat dalam rangka proses pengambilan keputusan yang baik dan benar bagi perusahaan maupun di luar perusahaan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan dengan judul **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Laporan Keuangan CV XYZ di Kota Gorontalo.**

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah laporan keuangan CV XYZ tahun 2019 dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) pada CV XYZ di Kota Gorontalo

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) pada CV XYZ di Kota Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah pengetahuan hal-hal yang menyangkut ilmu akuntansi khususnya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang menggunakan Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah.

2. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam melakukan penyusunan laporan keuangan UMKM sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.